

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

PNS Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal mempersepsi Perpres 160 Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Penghargaan terhadap kinerja PKB dan PLKB
2. Tuntutan terhadap profesionalisme
3. Evaluasi
4. Emosi (baik perasaan bangga yang merupakan emosi positif, maupun kekhawatiran akan adanya kecemburuan penghasilan yang merupakan emosi negatif).

Dari empat tema tersebut, diketahui bahwa persepsi PNS Struktural DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal terhadap Perpres 160 Tahun 2015 lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal. Yaitu tuntutan terhadap profesionalisme dan evaluasi yang menjadi fokus perhatian dalam penilaian kinerja. Selain itu emosi atau perasaan juga merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi persepsi PNS Struktural terhadap Perpres 160 Tahun 2015. Sedangkan penghargaan terhadap kinerja PKB dan PLKB merupakan faktor eksternal karena hal tersebut adalah sebuah informasi baru bagi PNS Struktural.

PNS Fungsional mempersepsi Perpres 160 tahun 2015 yang berisi tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan penghasilan
2. Tuntutan terhadap profesionalisme
3. Beban kerja yang semakin tinggi
4. Evaluasi yang lebih lengkap
5. Emosi (baik perasaan positif, seperti senang dan bangga, maupun perasaan negatif, berupa kekhawatiran akan adanya kecemburuan sosial).

Dari ke lima tema yang menjadi temuan penelitian, diketahui bahwa persepsi PNS Fungsional terhadap Perpres 160 Tahun 2015 juga lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal. Tema peningkatan penghasilan adalah sebuah harapan yang termasuk faktor internal. Tema selanjutnya yaitu tuntutan terhadap profesionalisme yang menjadi fokus atau perhatian adalah faktor internal sekaligus faktor eksternal karena melibatkan proses belajar terhadap hal-hal baru. Tema ke tiga dan keempat adalah beban kerja yang semakin tinggi dan evaluasi yang menjadi fokus atau perhatian dalam penilaian kinerja PNS Fungsional, yang juga merupakan faktor internal. Tema terakhir adalah emosi (perasaan) juga termasuk faktor internal.

Harapan PNS Struktural dan Fungsional terhadap Perpres 160 tahun 2015 ada dua pendapat, yaitu:

1. Mendapatkan kenaikan tunjangan dari Pemerintah Daerah.
2. Diikutsertakan dalam proses pengalihan menjadi PNS BKKBN.

Solusi terbaik dalam menyikapi perubahan aturan kepegawaian ini menurut PNS Struktural dan Fungsional serta Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Menurut PNS Struktural : agar diikutsertakan dalam proses pengalihan dari PNS Daerah menjadi PNS BKKBN atau jika tidak, agar Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan atau meningkatkan besaran tunjangan bagi PNS Struktural
2. Menurut PNS Fungsional: agar PNS Struktural dapat mengikuti dialihkan menjadi PNS BKKBN.
3. Menurut Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal: agar semua PNS Struktural dan Fungsional dialihkan menjadi PNS BKKBN.

## **B. Saran**

Setelah melakukan observasi partisipatif dan wawancara dengan PNS Struktural dan Fungsional DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal, maka peneliti merekomendasikan kepada instansi terkait, yaitu BKKBN untuk memberikan perhatian juga kepada PNS Struktural, dengan melakukan pengalihan PNS Struktural di instansi penyelenggara program KKBPK di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia menjadi PNS BKKBN. Hal ini diperlukan untuk menjaga keharmonisan hubungan kerja maupun keterikatan secara emosional sesama PNS di instansi penyelenggara program KKBPK, serta kemudahan dalam memberikan instruksi secara vertikal dari pusat ke

daerah demi terlaksananya program dengan baik dan mendapatkan capaian yang maksimal.

Sedangkan manfaat praktisnya bagi Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dan BKKBN, penelitian ini menjadi evaluasi, masukan, dan menambah informasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana perbaikan sistem kepegawaian yang selama ini telah berlangsung demi mencapai tujuan organisasi, yaitu menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas.

